

T	A	T	A
L	O	K	A

JURNAL TATA LOKA; VOLUME 13; NOMOR 2; MEI 2011
© 2011 Biro Penerbit Planologi UNDIP

PENYUSUNAN ARAHAN STRATEGI DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

*Directions Strategy And Development Priorities Of The State Border Between
In West Kalimantan Province*

Enni Lindia Mayona, Salahudin, dan Rahmi Kusmastuti

*Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, ITENAS Bandung
Email: emayona@yahoo.com, salahudin.fs@gmail.com, toeti2001@yahoo.com*

Abstract : Konsentrasi pembangunan pemerintah yang lebih menekankan keamanan dan bukan kesejahteraan seperti daerah-daerah lainnya menjadi sebuah anggapan bahwa perbatasan merupakan daerah yang terlupakan. Rencana-rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan telah disusun sejak tahun 2002 tetapi belum dapat direalisasikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh kebutuhan dana yang sangat besar dalam pengembangan kawasan dan terbatasnya dana yang tersedia. Pada mulanya kawasan perbatasan hanya sebagai kepentingan keamanan semata sehingga pembangunan tidak berjalan dengan baik dan mengabaikan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan arahan strategi dan prioritas pengembangan perbatasan Kalimantan Barat berdasarkan kondisi di 15 (lima belas) kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia (Sarawak) yaitu Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Putussibau, Keadamin, Puring Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, dan Embaloh Hulu. Analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Penentuan prioritas pengembangan kawasan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan Pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat, yaitu variabel ekonomi, sosial, dan fisik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana menjadi prioritas untuk pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Pengembangan Perbatasan, Prioritas, Strategi

Abstract : The government's development planning which concentrates to the security affairs not to the region's prosperity shows a tendency that most of border regions are the forgotten ones. The plans for developing the west Kalimantan border regions have been compiled since 2002, however, most of them have not emerged into a realization. It is caused due to a requirement of huge amount of finance and limited availability of the finance source. At the first, a border region emphasizes the security affairs merely; consequently the development process has not been conducted well and ignored its people's prosperity. The purpose of this research is to determine the strategy direction and priority for developing internations border regions in the province of West Kalimantan based on the condition of 15 (fifteen) districts which directly have a border with Malaysia (Sarawak), they are District of Paloh, District of Sajingan Besar, District of Jagoi Babang, District of Entikong, District of Sekayam, District of Ketungau Hulu, District of Ketungau Tengah, District of Putussibau, Keadamin, Puring Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, and Embaloh Hulu. The analysis applied here is a descriptive analysis with an approach of qualitative and quantitative data using SWOT analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP). The determination of a priority of region development is using variables connected with the development of West Kalimantan Region, which are variables of social, economy, and physic. The result of this research shows that facilities and infrastructure become a significant priority to develop the region borders of West Kalimantan.

Key word : development of border, priority, strategy

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk ke dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer. Selain itu, kawasan perbatasan juga merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya mayoritas kawasan perbatasan masih merupakan kawasan tertinggal. Kawasan perbatasan adalah wilayah yang secara geografis berbatasan langsung, baik terletak di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga yang batasnya ditetapkan sesuai fungsi “*security, prosperity* dan lingkungan” (Dardak, 2007) Kawasan perbatasan di Indonesia dapat dibedakan menjadi kawasan perbatasan laut dan kawasan perbatasan darat. Kawasan perbatasan antar negara di Indonesia merupakan salah satu kawasan perbatasan terpanjang di dunia yang memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda pada tiap kawasan.

Kawasan Perbatasan Kalimantan¹ merupakan salah satu kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Kalimantan memiliki 2 (dua) provinsi yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak dan Provinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan Sabah. Perkembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat lebih maju dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur hal ini disebabkan Provinsi Kalimantan Barat memiliki hubungan yang *intens* dengan Negara Malaysia dibandingkan dengan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur yang sebagian besar daerah perbatasannya masih berupa hutan konservasi.

Anggapan di masa lalu, bahwa wilayah perbatasan ini merupakan kawasan mengerikan yang perlu diawasi secara ketat karena dikhawatirkan akan menjadi tempat persembunyian para pemberontak dan peyelundup. Kondisi tersebut telah menjadikan paradigma pembangunan di wilayah ini lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan (*security approach*) daripada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Dampak dari cara pandang tersebut mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi daerah yang tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan dan pusat-pusat pelayanan pemerintah lainnya yang menyebabkan masyarakatnya menjadi relatif miskin dan tertinggal. Selama ini Kawasan Perbatasan Kalimantan kurang mendapat perhatian dari

pemerintah, sehingga ketertinggalan pembangunan baik itu fisik, ekonomi maupun sumber daya manusia dibandingkan dengan negara tetangga (Malaysia) semakin lama semakin terlihat Hal tersebut menyebabkan masyarakat Kawasan Perbatasan Kalimantan dari aspek ekonomi dan perdagangan lebih berorientasi kepada Pemerintah Negara Malaysia. Seperti contoh, Malaysia saat ini telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga kegiatan ekonomi pun dapat berjalan dengan baik (Bappenas, 2003).

Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dibandingkan dengan kawasan sekitarnya yang masih termasuk Provinsi Kalimantan Barat termasuk kedalam kawasan tertinggal. Hal tersebut terkait dengan kawasan perbatasan yang masih jauh dari dinamika pembangunan. Sarana dan prasarana yang minim menghambat kawasan perbatasan untuk lebih maju. Konsentrasi pembangunan pemerintah yang lebih menekankan keamanan dan bukan kesejahteraan seperti daerah-daerah lainnya menjadi sebuah anggapan bahwa perbatasan merupakan daerah yang terlupakan. Rencana-rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan telah disusun sejak tahun 2002 tetapi belum dapat direalisasikan. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan dana yang sangat besar dalam pengembangan kawasan dan dana yang dibutuhkan belum tersedia. Rencana yang telah dijalankan dan sedang diupayakan saat ini hanyalah rencana-rencana sektoral yang dilakukan oleh beberapa departemen teknis yang terkait, sedangkan untuk rencana yang sifatnya umum belum dapat direalisasikan. Rencana umum yang ada saat ini belum melihat bagaimana kondisi suatu kawasan, karena masih bersifat general. Kondisi suatu kawasan sangat diperlukan untuk mengetahui prioritas pengembangan yang sesuai.

Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat berpotensi sebagai pusat pertumbuhan akan tetapi memiliki beberapa permasalahan dari aspek fisik, sarana dan prasarana wilayah, sosial, ekonomi, serta politik. Permasalahan pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan arahan strategi dan prioritas pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat berdasarkan kondisi kawasan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Mengidentifikasi kondisi Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat.
- Merumuskan potensi dan masalah Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat.

¹ Untuk selanjutnya Perbatasan Kalimantan Barat yang dimaksud adalah kecamatan-kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung berbatasan dengan Sarawak-Malaysia

- Menentukan strategi pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat.
- Menentukan prioritas pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat.

Tabel 1. Permasalahan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat

Aspek	Permasalahan
Fisik	Pada umumnya kawasan perbatasan darat berada di daerah yang terisolir dan pedalaman dengan kondisi alam yang sulit dijangkau.
Prasarana Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan prasarana wilayah seperti jaringan jalan, tenaga listrik, air bersih dan telekomunikasi sebagai faktor penggerak kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan • Kurangnya perhatian terhadap infrastruktur yang ada sehingga Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat menjadi kawasan tertinggal
Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan antara penduduk kawasan perbatasan dengan penduduk negara tetangga, sehingga kehidupan masyarakat Kawasan Perbatasan Kalimantan lebih condong ke negara tetangga • Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat melatarbelakangi maraknya kegiatan-kegiatan ilegal seperti <i>illegal logging</i>, <i>illegal trading</i>, <i>trafficking</i> serta kegiatan ilegal lainnya
Politik	Kecenderungan masyarakat terhadap negara tetangga akibat rendahnya akses informasi dan komunikasi yang diperoleh menyebabkan lunturnya nilai nasionalisme terhadap NKRI

Sumber: Berbagai sumber

Metode Penelitian

Lingkup wilayah penelitian ini adalah Perbatasan Kalimantan Barat yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Sarawak yang merupakan bagian dari 5 (lima) kabupaten. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar yang berada di Kabupaten Sambas; Kecamatan Jagoi Babang dan Siding yang terdapat di Kabupaten Bengkayang; Kecamatan Entikong dan Sekayam yang terdapat di Kabupaten Sanggau; Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah yang terdapat di Kabupaten Sintang, dan Kecamatan Putussibau, Kedamin, Puring Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, dan Embaloh Hulu yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder sebagai berikut:

Data Primer

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas, karena dalam melakukan wawancara peneliti hanya terpusat pada masalah yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan yakni dengan wawancara langsung kepada staf dari instansi yang menangani masalah perbatasan (Bappenas dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal). Wawancara ini bertujuan untuk menggal infor-

masi tentang kondisi eksisting Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, permasalahan, dan rencana-rencana yang telah disusun untuk mengembangkan kawasan perbatasan dari tiap-tiap departemen yang terkait dengan pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. Hasil wawancara yang telah dilakukan dicatat dan digunakan sebagai data tambahan dalam penyusunan gambaran umum dan analisis.

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau yang lebih dikenal dengan metoda kuesioner. Pada penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah jenis angket langsung karena peneliti mengirimkan dan memberikan lembar pertanyaan (kuisisioner) kepada 7 (tujuh) responden yang terdiri dari: Praktisi Tata Ruang, Akademisi, Kepala Bidang Perbatasan Darat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Bidang Fisik Prasarana, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dan Staf Direktorat Kawasan Khusus dan daerah Tertinggal Bappenas.

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan responden dalam wawancara dan penyebaran angket menggunakan teknik *purposive sampling*. Responden tersebut dipilih karena peneliti anggap cukup memahami permasalahan mengenai kawasan perbatasan. Kuisisioner ini bertujuan untuk mengetahui prioritas

pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat yang juga menjadi hasil akhir dalam penelitian ini.

Data Sekunder

Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan. Data yang didapat berupa kajian-kajian tentang kawasan perbatasan baik itu Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. Data sekunder lainnya diperoleh melalui media informasi baik itu elektronik *online* (internet) maupun media cetak dan jurnal. Data tersebut berupa studi-studi terdahulu dan kebijakan tentang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Surachmad (1975) tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, sedangkan menurut Nazir (1988) penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengacu pada suatu objek atau peristiwa yang terjadi saat ini.

Pendekatan analisis data kualitatif dalam penelitian ini dipergunakan untuk meninjau kondisi kawasan perbatasan dan menentukan potensi, masalah serta arahan strategi pengembangan kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan menggunakan alat analisis SWOT. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini dipergunakan untuk menentukan prioritas pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan menggunakan alat analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Tahapan Analisis

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel tahapan analisis dapat dilihat pada tabel 1.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Umum Kawasan Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain (Sudibyo 2006). Wilayah perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten, atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga). Penentuan luas wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara, yaitu fungsi *security* dan fungsi *prosperity* dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur.

Indonesia merupakan sedikit negara di dunia yang memiliki dua bentuk kawasan perbatasan, yaitu kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut. Secara umum, karakteristik kedua bentuk kawasan perbatasan ini hampir sama. Namun demikian, untuk kawasan perbatasan laut ada beberapa hal yang spesifik, terutama karena bentuknya berupa pulau dan letaknya di tengah laut, bahkan samudera. Karakteristik kawasan perbatasan laut seperti ini menyebabkan batas laut lebih rentan, karena pulau tersebut tenggelam atau hilang. Kerentanan batas laut tadi dapat dikarenakan faktor lingkungan alami (bencana alam, badai, tsunami, dan lain-lain) maupun faktor lingkungan buatan (pengerukan pasir).

Sementara itu, kawasan perbatasan darat meliputi provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste, dan Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kawasan Perbatasan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga

Negara	Provinsi	Kabupaten
Malaysia	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Saggau, dan Kabupaten Kapuas Hulu
	Kalimantan Timur	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Kutai Barat
Timor Leste	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Timor Tengah Utara
Papua Nugini	Papua	Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, dan Kota Jayapura

Sumber: Alkadri dan Hamid. 2007

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki batas negara di laut dengan sepuluh negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste (I Nyoman Arinu dalam Alkadri dan Hamid 2007). Pulau-pulau kecil yang berbatasan

dengan sepuluh negara tetangga berjumlah 88 pulau dan tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Tabel 3. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia dengan Sepuluh Negara Tetangga

Negara	Provinsi
India	Nanggroe Aceh Darussalam
Malaysia	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau
Singapura	Kepulauan Riau
Thailand	Kepulauan Riau
Vietnam	Kepulauan Riau
Filipina	Sulawesi Utara, Maluku Utara
Timor Leste	Nusa Tenggara Timur, Maluku
Papua Nugini	Papua
Australia	Papua dan Maluku
Palau	Papua

Sumber: I Nyoman Arinu dalam Alkadri dan Hamid 2007

Tabel 4. Tahapan Analisis

Sasaran	Tahapan Analisis	Metode dan Alat Analisis	Output
Mengidentifikasi kondisi Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan meninjau kondisi eksisting	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan kondisi eksisting kawasan perbatasan Kalimantan Barat berdasarkan data dari dinas terkait. Kondisi eksisting kawasan dikhususkan pada kondisi fisik dan fasilitas kawasan perbatasan melalui 	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Mengetahui kondisi fisik Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat saat ini

Sasaran	Tahapan Analisis	Metode dan Alat Analisis	Output
kawasan	tinjauan kondisi fisik sarana serta prasarana yang terdapat di wilayah studi		
Merumuskan potensi masalah Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan variabel-variabel yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Menentukan potensi masalah berdasarkan hasil identifikasi kondisi Perbatasan Kalimantan Barat yang dibatasi pada sektor ekonomi, sosial budaya, serta fisik. 	Pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan LQ	Mengetahui potensi masalah yang akan digunakan dalam penentuan strategi pengembangan kawasan perbatasan.
Menentukan strategi pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> Strategi pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat ditentukan dengan mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. Identifikasi kondisi internal diarahkan pada: Semua kondisi yang terdapat pada kecamatan-kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia Identifikasi Kondisi eksternal diarahkan pada: Semua kondisi yang terdapat pada wilayah eksternal yaitu Kabupaten yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat Setelah mengidentifikasi kondisi eksternal dan internal, maka hasil identifikasi tersebut dimasukkan kedalam matrik SWOT 	Pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat analisis SWOT.	Hasil dari analisis SWOT ini dapat digunakan untuk melihat potensi arah pengembangan dari suatu wilayah, serta dapat digunakan untuk melihat kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh suatu wilayah dan berusaha untuk dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut
Menentukan prioritas pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> Pengelompokkan strategi dari analisis SWOT Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan Barat Menentukan prioritas berdasarkan hasil kuisioner yang dihitung melalui proses AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>) 	Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis AHP	Mengetahui prioritas pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan.

Sumber: Hasil Analisis

Karakteristik Kawasan Perbatasan

Indonesia

A. Karakteristik Fisik dan Infrastruktur

Menurut Alkadri dan Hamid (2007) Ditinjau dari aspek fisik dan infrastruktur, maka

karakteristik kawasan perbatasan Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut:

1. Batas fisik wilayah negara di kawasan perbatasan sangat memprihatinkan, karena banyak patok batas yang hilang dan sebagian besar kondisinya kurang baik. Hal ini antara lain terjadi di sekitar perbatasan

- Kalimantan Barat dengan Serawak (Malaysia).
2. Pada umumnya kawasan perbatasan darat berada didaerah yang terisolir dan pedalaman dengan kondisi alam yang sulit dijangkau. Misalnya, beberapa desa di Kecamatan Krayan (Kabupaten Nunukan) yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia), sedangkan kawasan perbatasan laut berada di pulau-pulau kecil terluar dan sebagian tidak berpenghuni dan tidak ada aktivitas, serta hampir tenggelam baik akibat proses alami maupun perbuatan manusia (pengambilan pasir).
 3. Hutan yang ada di sepanjang kawasan perbatasan umumnya hutan alam dan sebagian besar dikategorikan sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung dengan kandungan keanekaragaman hayati yang tinggi. Contoh, hutan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Infrastruktur di kawasan perbatasan relatif masih sangat terbatas dan perlu penanganan yang serius, terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, telekomunikasi, dan informasi, serta pemukiman. Sebagai ilustrasi, selain telekomunikasi dan informasi yang hampir tidak memadai, Kecamatan Krayan juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan darat. Aksesibilitas kecamatan ini terhadap daerah lain, seperti Kecamatan Nunukan (bagian pulau) atau Kota Tarakan, harus ditempuh dengan biaya yang cukup mahal karena dengan menggunakan pesawat terbang jenis C-212 dan C-185.
 5. PPLB (Pos Pelayanan Lintas Batas) belum memadai dan belum lengkap dibandingkan dengan luas kawasan perbatasan. Contohnya PPLB Entikong di Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat) tidak hanya melayani lintas batas dari dan ke Kabupaten Sanggau, tetapi juga beberapa kabupaten atau kota lain di Provinsi ini seperti Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Singkawang, dan lain-lain.

B. Karakteristik Sosial Ekonomi

Beberapa karakteristik kawasan perbatasan Indonesia dilihat dari aspek sosial ekonomi adalah seperti di bawah ini (Alkadri dan Hamid, 2007):

1. Kualitas sumberdaya manusia masih rendah, terutama dari segi pendidikan
2. Penyebaran penduduk tidak merata dan di kawasan perbatasan laut, khususnya di pulau-pulau terluar, banyak yang tidak berpenghuni.
3. Arus keluar-masuk tenaga kerja dan penduduk ke dan dari kawasan perbatasan cukup tinggi. Contoh: Kabupaten Nunukan yang melayani arus keluar-masuk Kalimantan-Sulawesi dengan Sabah.
4. Penduduk di perbatasan umumnya memiliki hubungan keluarga dengan penduduk di kawasan perbatasan negara tetangga. Misalnya suku dayak yang bermukim didaerah perbatasan Kalimantan Barat masih memiliki banyak kerabat di wilayah Sarawak (Malaysia).
5. Terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup besar antara penduduk di perbatasan dengan penduduk di negara tetangga. Contoh: pada tahun 2001 lalu pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Nunukan hanya Rp 6,5 juta setahun, sementara penghasilan per kapita penduduk di Negara Bagian Sabah (Malaysia) mencapai Rp 17,5 juta.
6. Aktivitas perdagangan ilegal dan penyelundupan di kawasan perbatasan cukup tinggi. Sebagai ilustrasi, perdagangan ilegal kayu gelondongan maupun hasil-hasil pertanian antara Nunukan dan Tawau hingga kini masih terus berlangsung.
7. Nilai tambah produk, terutama yang berasal dari sumberdaya alam, masih sangat kecil. Kakao yang dihasilkan oleh Kabupaten Nunukan hanya mendatangkan nilai tambah dalam bentuk perkebunan, sedangkan nilai tambah dalam bentuk industri pengolahannya dinikmati oleh negara tetangga, Sabah (Malaysia).
8. Mata pencaharian penduduk di kawasan perbatasan sebagai besar adalah petani, pekebun, dan nelayan.
9. Sistem perdagangan antarpenduduk di kawasan perbatasan masih bersifat tradisional, karena belum memadainya infrastruktur perekonomian (seperti bank dan pasar).
10. Pendapatan (hasil usaha) yang diperoleh sebagian besar untuk memnuhi kebutuhan primer keluarga (kebutuhan pokok).

11. Rendahnya aktivitas dan efektivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
12. Alokasi dana pembangunan kawasan perbatasan hingga kini relatif masih kecil.

C. Karakteristik Pertahanan

Menurut sudut pandang pertahanan, beberapa karakteristik kawasan perbatasan Indonesia dapat dikemukakan di bawah ini (Alkadri dan Hamid, 2007):

1. Adanya kegiatan penyelundupan barang dan tenaga kerja Indonesia (TKI).
2. Rentannya persoalan yang berkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia.
3. Rendahnya penegakan supremasi hukum, akibat sangat kecilnya tenaga penegak hukum (terutama polisi perbatasan).
4. Derasnya informasi dan komunikasi dari negara tetangga menyebabkan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga dibandingkan negaranya sendiri.

1.1 Cross Border Approach (CBA)

Menurut Guo (1996) pendekatan *Cross Border Approach* (CBA) lebih mengutamakan pola kerjasama antar daerah perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dalam mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara. Pola kerjasama ini dapat dilaksanakan pada wilayah dengan karakteristik sebagai berikut:

- Adanya perbedaan konsep pengembangan sosial ekonomi dengan wilayah tetangga.
- Adanya keterbatasan jaringan penghubung, baik jalan maupun telekomunikasi di kota yang merupakan pusat kegiatan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, baik adanya perbedaan konsep maupun keterbatasan jaringan penghubung, maka langkah awal yang perlu ditempuh adalah membuka penghalang pada daerah tersebut dan menerapkan sistem yang lebih terbuka agar jalinan kerjasama yang baik dapat terwujud. Dengan pola kerjasama ini akan membuka aliran barang, uang serta orang yang masuk lebih cepat dan akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sosial ekonomi yang lebih baik antar kedua negara. Hal lain yang perlu mendapat perhatian agar pendekatan ini berjalan efisien yaitu salah satu wilayah hendaknya memiliki keuntungan komparatif baik dari segi ekonomi

maupun teknologi serta tidak terdapatnya penghalang dalam arti secara fisik maupun ideologi di antara kedua negara sehingga hubungan kerjasama dapat terjalin.

PENYUSUNAN ARAHAN STRATEGI DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

Perbatasan Kalimantan Barat yang umumnya merupakan kawasan tertinggal memiliki potensi nilai strategis yang disebabkan secara langsung berbatasan dengan negara Malaysia bagian Sarawak. Keteringgalan tersebut dapat dilihat dari perbandingan di sektor ekonomi, kependudukan, dan infrastruktur dengan Malaysia. Tingkat perekonomian negara tetangga lebih tinggi dibandingkan dengan perbatasan Kalimantan Barat. Kondisi infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan Kalimantan sangat terbatas berbeda dengan Malaysia yang telah memadai. Untuk itu kondisi perbatasan Kalimantan khususnya Kalimantan Barat perlu dibenahi terkait dengan kawasan perbatasan sebagai beranda negara dan memungkinkan terjadinya hubungan langsung dengan negara tetangga. Kondisi ini merupakan pasar potensial yang dapat dimanfaatkan tidak saja bagi produsen internal di masing-masing daerah pada wilayah perbatasan tetapi juga secara nasional. Untuk menunjang kawasan perbatasan sebagai beranda negara, kawasan perbatasan diarahkan menjadi kawasan yang:

1. Memiliki pos lintas batas yang dilengkapi dengan fasilitas CISQ (*Custom Immigration Security Quarantine*) di tiap-tiap daerah yang secara langsung berbatasan
2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar perbatasan.
3. Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dengan rata-rata lama sekolah di atas 6 tahun.
4. Memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dari segi pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakatnya.
5. Memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat disejajarkan dengan masyarakat negara tetangga.

4.1 Analisis Potensi Ekonomi dan Ketersediaan Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat

Pada analisis potensi ekonomi akan dijelaskan mengenai potensi basis di sektor pertanian dan perkebunan yang terdapat di 15 (lima belas) kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia. Potensi tersebut didapat berdasarkan perhitungan menggunakan LQ (*Location Quotient*). Untuk nilai $LQ > 1$ berpotensi sektor tersebut dapat menjadi komoditas ekspor yang bertujuan untuk mengembangkan perbatasan Kalimantan Barat. Untuk analisis ketersediaan sarana prasarana wilayah perbatasan akan dijelaskan mengenai memadai atau tidaknya sarana dan prasarana

umum yang terdapat di Kecamatan Perbatasan Kalimantan Barat berdasarkan standar yang ada. Sarana dan Prasarana umum itu meliputi sarana kesehatan, pendidikan, komunikasi, informasi, dan kelistrikan.

4.1.1 Analisis Potensi Ekonomi Perkebunan dan Pertanian

Berdasarkan kajian ekonomi diketahui bahwa potensi basis di kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah sektor pertanian dan perkebunan. Potensi basis yang dimiliki tiap kecamatan untuk sektor pertanian dan perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Potensi Basis Pada Sektor Pertanian dan Perkebunan

No	Kabupaten	Kecamatan	Pertanian	Perkebunan
1	Sambas	Sajingan Besar	Padi	Karet dan Coklat
		Paloh	Padi	Kopi dan Lada
2.	Bengkayang	Jagoi Babang	Palawija	Kelapa
		Siding	Palawija dan Sayuran	Karet dan Coklat
3.	Sanggau	Sekayam	-	-
		Entikong	Palawija dan Sayuran	Karet
4.	Sintang	Ketungau Hulu	Padi	Karet
		Ketungau Tengah	Palawija	Karet
5.	Kapuas Hulu	Kedamin	Padi	Karet dan Coklat
		Puring Kencana	Padi	-
		Badau	Palawija	-
		Batang Lupar	Padi dan Buah-buahan	Karet
		Embaloh Hulu	Padi	Karet dan Coklat
		Putussibau	Sayuran dan Buah-buahan	Karet
		Empanang	Padi	Karet

Sumber: Hasil Perhitungan LQ dari data Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Perbatasan Kalimantan Barat, 2006

Berdasarkan potensi basis pada sektor pertanian dan perkebunan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar produksi pertanian di 15 (lima belas) kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia adalah pada produksi padi dan palawija, sedangkan untuk produksi perkebunan sebagian besar menghasilkan produksi karet. Pada Kecamatan Sekayam, Puring Kencana, dan Badau tidak tersedianya data mengenai hasil produksi pertanian dan perkebunan, maka tidak di temukan potensi basis yang terdapat pada 3 (tiga) kecamatan tersebut.

Analisis Ketersediaan Sarana Prasarana Perbatasan Kalimantan Barat

Analisis ketersediaan prasarana dan sarana perbatasan Kalimantan Barat dilakukan untuk mengetahui memadai atau tidaknya prasarana dan sarana yang terdapat di perbatasan Kalimantan Barat berdasarkan standar yang ada. Standar yang digunakan adalah standar SNI 03-6981-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan. Lengkapnya sarana dan prasarana yang ada mendukung pengembangan perbatasan Kalimantan Barat sebagai "beranda negara" yang memiliki nilai strategis. Berikut ini kondisi sarana dan

prasarana yang belum memadai yang ada di Kalimantan Barat dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Umum di Kecamatan Perbatasan Antar Negara di Provinsi Kalimantan Barat

Aspek	Kecamatan
Pendidikan	
Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP)	Ketungau Hulu, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Empanang
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	Ketungau Hulu, Kedamin, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Empanang
Kesehatan	
Puskesmas	Sajingan Besar, Siding, Sekayam, Entikong, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kedamin, Puring Kencana, Batang Lupar, Embaloh Hulu
Tenaga Kesehatan	Sajingan Besar, Paloh, Jagoi Babang, Siding, Sekayam, Entikong, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kedamin, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau, Empanan
Komunikasi	
Ketersediaan sarana komunikasi (telepon rumah dan radio komunikasi)	Sajingan Besar, Jagoi Babang, Siding, Sekayam, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kedamin, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu
Informasi	
Ketersediaan akses informasi (kantor pos, pos keliling, surat kabar)	Sajingan Besar, Jagoi Babang, Siding, Entikong, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kedamin, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau
Kelistrikan	
Ketersediaan listrik	Sajingan Besar, Jagoi Babang, Siding, Sekayam, Entikong, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kedamin, Puring Kencana, Batang Lupar, Embaloh Hulu

Sumber: BPS 2007 dan SNI 03-6981-2004

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat terlihat sebagian besar sarana dan prasarana umum yang terdapat di Perbatasan Kalimantan Barat belum memadai. Hal tersebut menjelaskan selama ini perbatasan Kalimantan Barat masih mengalami ketertinggalan dengan negara tetangga berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana umum.

Analisis SWOT

Penyusunan Rencana pengembangan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (*Strengthness, Weakness, Opportunity, and Threats*), yaitu suatu analisis yang bertujuan mengetahui potensi dan kendala yang dimiliki, sehubungan dengan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di masa datang (Rangkuty 1997). Analisis ini meliputi tinjauan terhadap Kekuatan (*strengthness*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threats*) terhadap pengembangan Perbatasan

Kalimantan Barat yang berasal dari kondisi internal dan eksternal kawasan Perbatasan Kalimantan Barat.

Sebelum menentukan strategi SWOT ditentukan terlebih dahulu isu strategis yang terdapat di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat. Isu strategis ini terkait dengan permasalahan umum yang terdapat di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat. Melalui analisis SWOT ini diharapkan akan dapat diketahui akar masalah yang ada, potensi dan kekuatan yang dapat diberdayakan dalam pembangunan daerah, menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan membuat metode pemecahan masalah serta metode untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi-strategi S+O, Strategi S+T, Strategi W+O, dan Strategi W+T. Analisis SWOT dalam penelitian ini dilakukan per kecamatan yang terdapat di 5 (lima) kabupaten sehingga dihasilkan arahan strategi pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat.

Setelah strategi terbentuk dan sebelum melakukan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) disusun pengelompokan strategi SWOT yang nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan analisis AHP. Untuk melakukan analisis AHP dibutuhkan faktor-faktor yang akan dicari prioritas yang nantinya menjadi prioritas

pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat. Faktor tersebut didapat dari pengelompokan strategi SWOT 15 (lima belas) kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia.

Tabel 6. Pengelompokan Faktor berdasarkan Variabel Penentu Pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengelompokan Faktor
Ekonomi	Pengembangan sektor-sektor unggulan	Potensi sektor basis di kawasan perbatasan	Ekonomi
	Perekonomian Daerah	Jumlah angkatan kerja LPE Pergerakan jasa (lalu lintas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara tetangga)	
	Pendapatan Daerah	PDRB PDRB per Kapita	Ekonomi
Sosial	Struktur penduduk	Jmlh penduduk kawasan perbatasan Jmlh penduduk berdasarkan jenis kelamin Jmlh penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Jmlh Penduduk berdasarkan umur Jmlh penduduk berdasarkan jenis pekerjaan Pertumbuhan rata-rata per tahun (%) Tingkat pengangguran	Pendidikan Sumber Daya Manusia
Fisik	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan sarana perbatasan (kantor bea dan cukai, kantor imigrasi, serta pos keamanan) Ketersediaan sarana dan prasarana umum di kawasan perbatasan	Keamanan Sarana dan Prasarana

Terdapat 5 (lima) faktor yang terbentuk, faktor-faktor tersebut adalah 1) Keamanan; 2) Sarana dan prasarana; 3) Pendidikan; 4) Sumber daya manusia; dan 5) Ekonomi. Pembentukan 5 (faktor) tersebut

berdasarkan permasalahan umum yang terjadi di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Permasalahan Umum yang Terdapat di Sepanjang Perbatasan Kalimantan Barat

Faktor	Permasalahan
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Penyelundupan dan perdagangan gelap yang merugikan kekayaan negara, baik dalam bentuk penerimaan bea ekspor-impor maupun penyusutan sumber daya alam, dan juga mengakibatkan ketegangan politik di dalam negeri akibat masih lemahnya sarana dan prasarana kepabean (Sudibyo 2006) Jumlah pos perbatasan yang sangat kecil dan jumlah aparat yang tidak sebanding dengan panjangnya garis perbatasan serta masih lemahnya koordinasi antar instansi di kawasan perbatasan (TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dll)

Faktor	Permasalahan
	menimbulkan kesulitan pengawasan terhadap pelintas batas ilegal, <i>illegal trading</i> , dan kegiatan <i>illegal logging</i> (Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Kalimantan Barat 2007)
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah perbatasan antar negara di Kalimantan Barat masih merupakan wilayah tertinggal dengan sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, akibat dari kebijakan pendekatan pembangunan di wilayah tersebut selama ini lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan daripada pendekatan kesejahteraan (Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Kalimantan Barat 2007) Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar yang menunjang kegiatan ekonomi pelintas batas oleh masyarakat sekitar perbatasan dan pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri (Koespramoedyo 2004)
Pendidikan	Rendahnya kualitas pendidikan di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat akibat adanya tawaran pekerjaan pekerjaan dari negara tetangga Malaysia. Gaji yang cukup besar menjadi alasan yang memicu anak-anak desa perbatasan yang setelah tamat SD tak bersedia melanjutkan ke SLTP (Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Kalimantan Barat 2007)
Sumber Daya Manusia	Kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan masih rendah dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan maupun ketrampilan masyarakatnya (Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Kalimantan Barat 2007)
Ekonomi	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat melatarbelakangi maraknya kegiatan-kegiatan ilegal seperti <i>illegal logging</i> , <i>illegal trading</i> , <i>trafficking</i> serta kegiatan ilegal lainnya (Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Kalimantan Barat 2007)

Sumber: Berbagai Sumber

Masing-masing faktor terdapat strategi yang berasal dari 15 (lima belas) kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia. Lebih

jelasan untuk pengelompokkan strategi SWOT dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 8. Pengelompokkan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Faktor	Strategi
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pembangunan PLB (<i>bordergate</i>) yang dilengkapi dengan fasilitas CISQ (<i>Custom, Immigration, Security, Quarantine</i>) untuk mengurangi usaha <i>illegal logging</i> dan penyelundupan Peningkatan fungsi pos lintas batas untuk meminimalisasi adanya kegiatan penyelundupan, penjarahan kayu dan TKI ilegal Peningkatan kerjasama masyarakat dengan pemerintah guna menjaga pemanfaatan, keamanan, dan kelestarian hutan untuk mencegah terjadinya kegiatan <i>illegal logging</i>
Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dasar khususnya jaringan komunikasi untuk menunjang pengembangan perbatasan Kalimantan Barat Segera menyelesaikan pembangunan pos lintas batas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mempermudah kegiatan ekspor hasil perkebunan dan kayu ke Malaysia Perbaikan prasarana jalan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia untuk peningkatan pengembangan perbatasan Peningkatan kualitas akses komunikasi untuk mempermudah penyampaian informasi mengenai kegiatan <i>illegal logging</i> dan penyelundupan TKI Mempercepat pembangunan pos lintas batas untuk mendukung kawasan

Faktor	Strategi
	perbatasan sebagai beranda depan
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat dengan mengampun-ayakan pentingnya pendidikan, serta subsidi pendidikan bagi keluarga tidak mampu • Peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan mutu SDM melalui pembebasan pembayaran uang sekolah bagi kelompok anak usia sekolah dasar • Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dengan menambah tenaga pendidik yang handal
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka lapangan pekerjaan di sector pengembangan industri kayu dan pengolahan hasil perkebunan rakyat • Menambah kualitas kesehatan dengan menambah tenaga medis yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas SDM guna mendukung pengembangan perbatasan Kalimantan Barat • Memberikan pelatihan khusus bagi para pekerja di sector pertanian dan perdagangan sehingga menjadikan pekerja yang berkualitas meski jenjang pendidikan hanya sampai SLTA • Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang akan bekerja menjadi TKI di Malaysia dan menyalurkannya melalui biro yang legal
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka kerjasama pembangunan antar kawasan dengan Malaysia di sector ekonomi dengan mengekspor hasil produksi pertanian dan perkebunan • Menciptakan peluang dan promosi investasi pembangunan kawasan didukung komitmen kelembagaan dan pendanaan yang memadai berdasarkan kekayaan sumberdaya alam setempat, serta partisipasi swasta dan masyarakat • Peningkatan perdagangan lintas batas (kegiatan ekspor dan impor) melalui jalur darat maupun laut secara lebih berdayaguna dan berhasil guna • Melakukan pengembangan dan promosi kegiatan pariwisata untuk menarik kunjungan wisata

Sumber: Ringkasan Matrik Strategi Masing-Masing Kecamatan Perbatasan Kalimantan Barat

4.2 Analisis Prioritas Pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat

Proses penentuan prioritas pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat menggunakan alat analisis AHP dan didasari oleh nilai bobot prioritas yang dihitung dengan beberapa tahap. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan alat analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) ditemukan prioritas

pengembangan untuk Perbatasan Kalimantan Barat adalah faktor sarana dan prasarana yang diikuti dengan faktor sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan terakhir adalah keamanan. Prioritas tersebut didapat berdasarkan nilai bobot prioritas. Untuk lebih jelasnya lihat **Tabel 9**

Tabel 9. Nilai Bobot Prioritas

Kriteria	Bobot Prioritas
Sarana dan Prasarana	31%
Sumber Daya Manusia	21%
Ekonomi	19%
Pendidikan	17%
Keamanan	12%

Sumber: Hasil Pengolahan

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat yang selama ini selalu menjadi kendala. Umumnya wilayah perbatasan memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai. Pada Perbatasan Kalimantan Barat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan meliputi sarana dan prasarana perbatasan (Pos Lintas Batas, jalan) serta pendidikan (gedung sekolah). Ketidakmerataan sarana dan prasarana yang ada di perbatasan Kalimantan Barat menyebabkan adanya ketimpangan terutama dengan Malaysia sebagai negara tetangga.

Pada penelitian Calderón dan Servén (2004) yang berjudul *The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution* menghasilkan kesimpulan bahwa pembangunan fasilitas layanan infrastruktur merupakan bagian penting untuk tercapainya pertumbuhan suatu wilayah, pertumbuhan secara positif dipengaruhi oleh persediaan aset infrastruktur, sedangkan pada Perbatasan Kalimantan Barat infrastruktur yang ada masih belum memadai untuk pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat sehingga pertumbuhan di sepanjang Perbatasan Kalimantan Barat masih sangat lambat. Infrastruktur dalam pengembangan wilayah strategis juga dapat dikatakan sebagai "strategic point" yang diperuntukkan untuk memperkuat wilayah strategis tersebut. Selain itu "Infrastructure as a tool to regional development" karena peran infrastruktur yang sangat penting. Pengembangan wilayah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya infrastruktur yang memadai.

Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan suatu wilayah, para pakar infrastruktur sepakat bahwa dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemeran utama dalam sektor infrastruktur seharusnya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur juga seharusnya melibatkan pihak swasta dan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang berkesinambungan. Sebaiknya ada kombinasi yang tepat antara infrastruktur berskala besar dan kecil untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai

dari perencanaan sampai pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah maupun wilayah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada penelitian ini yaitu merumuskan arahan strategi dan prioritas pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi kondisi eksisting maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi-strategi pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan Barat 15 (lima belas) kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Negara tetangga (Malaysia) yaitu Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Putussibau, Kedamin, Puring Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, dan Embaloh Hulu, dikelompokkan menjadi 5 (lima) faktor yang berasal dari variabel penentu pengembangan (sosial, ekonomi dan fisik). Faktor-faktor tersebut adalah keamanan, sarana dan prasarana, pendidikan, ekonomi, dan sumber daya manusia.

Adapun strategi yang disusun untuk pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat yaitu:

- Peningkatan sarana dasar khususnya jaringan komunikasi untuk menunjang pengembangan perbatasan Kalimantan Barat
- Segera menyelesaikan pembangunan pos lintas batas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mempermudah kegiatan ekspor hasil perkebunan dan kayu ke Malaysia
- Perbaikan prasarana jalan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia untuk peningkatan pengembangan perbatasan
- Peningkatan kualitas akses komunikasi untuk mempermudah penyampaian informasi mengenai kegiatan *illegal logging* dan penyelundupan TKI
- Mempercepat pembangunan pos lintas batas untuk mendukung kawasan perbatasan sebagai beranda depan

Berdasarkan hasil penghitungan AHP didapat prioritas pengembangan Kawasan

Perbatasan Kalimantan Barat adalah pada faktor sarana dan prasarana. Prioritas pengembangan sarana dan prasarana didapat berdasarkan hasil analisis AHP dengan bobot prioritas paling tinggi dari faktor-faktor lainnya yaitu sebesar 31% yang kemudian diikuti dengan sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Sarana dan prasarana menjadi prioritas pengembangan karena untuk mengembangkan Perbatasan Kalimantan Barat sarana dan prasarana perlu dikembangkan terlebih dahulu mengingat berdasarkan teori yang ada menjelaskan fasilitas layanan infrastruktur merupakan bagian penting untuk tercapainya pertumbuhan suatu wilayah. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Perbatasan Kalimantan Barat yang masih sangat memprihatinkan menyebabkan tertinggalnya pembangunan di sepanjang perbatasan sehingga menyebabkan masyarakat memiliki kecenderungan hidup dengan berorientasi ke negara tetangga (Malaysia).

Berdasarkan penjabaran simpulan diatas dapat disusun rekomendasi untuk pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana di sepanjang Perbatasan Kalimantan Barat untuk mendukung pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat sebagai beranda negara terutama kualitas kondisi jalan.
2. Peningkatan peran serta dan kerjasama pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani permasalahan dan pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat.
3. Meningkatkan kualitas pos lintas batas dengan melengkapi fasilitas CISQ (*Custom Immigration Security dan Quarantine*).
4. Peningkatan Kualitas keamanan di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dengan menambah personil petugas keamanan di tiap pos keamanan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, dan Hamid. 2007. *Model dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- BAPPENAS. 2003. *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
- Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan. 2006. *Potensi dan Permasalahan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kalimantan Barat*. Provinsi Kalimantan Barat
- BPS. 2007. *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2007*. Kabupaten Bengkayang: BPS Kalimantan Barat
- BPS. 2007. *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2007*. Kabupaten Kapuas Hulu: BPS Kalimantan Barat
- BPS. 2007. *Kabupaten Sambas Dalam Angka 2007*. Kabupaten Sambas: BPS Kalimantan Barat
- BPS. 2007. *Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2007*. Kabupaten Sanggau: BPS Kalimantan Barat
- BPS. 2007. *Kabupaten Sintang Dalam Angka 2007*. Kabupaten Sintang: BPS Kalimantan Barat
- Dardak, H. 2007. *Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Perbatasan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Binamarga Departemen Pekerjaan Umum
- Dardak, Hermanto. 2007. *Kota-kota Perbatasan Antar Negara di Pulau Kalimantan (Kota Aru, Entikong, Simanggaris, dan Nunukan)*. Program Terpadu Pemanfaatan Ruang. Edisi 1. hal.3
- Guo, Rongxing. 1996. *"Border-Regional Economics"*. China: Physica-Verlag
- Koespramoedyo, Deddy. 2004. *Menjadikan Kawasan Perbatasan Antar Negara sebagai "Halaman Depan Negara"*. *Buletin Kawasan Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Deputi Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Bapenas*, Vol. 3 No. 1, Februari 2004
- Nazir, Moh, Ph.D. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudibyoy, P. 2006. *Ancaman Terhadap Kelestarian Sumberdaya Alam di Kawasan Perbatasan Negara*. Penataan Ruang dan Daerah Perbatasan. Juli-Agustus 2006. hal 6-8

Surachmad, Winarno. 1975. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV Tarsito

Rangkuty, Freddy. 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

_____. 2005. *Pemutakhiran Data dan Informasi Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar*.